



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 1773/ Setda / 188.4 / Tahun 2025

T E N T A N G

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 3684 Tahun 2025, Nomor 3687 Tahun 2025, Nomor 3704 Tahun 2025 dan Nomor 3733 Tahun 2025

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan hasil pengujian yang tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 3684 Tahun 2025, Nomor 3687 Tahun 2025, Nomor 3704 Tahun 2025 dan Nomor 3733 Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 01 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



Ttd

A. ZULKIFLY

Tembusan :

1. Wali Kota Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
6. masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 1773/Setda/188.4/Tahun 2025
TANGGAL: 1 Desember 2025
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Laporan Keuangan sebelum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2); b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Pasal 17 dan 18 ayat (1); dan c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan; dan b. Jika diumumkan sebelum pemeriksaan, laporan dapat menghasilkan informasi yang salah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan; b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangun; c. Melindungi penyalahgunaan data/ informasi. 	Relevan dapat dibuka setelah proses audit selesai
2	Dokumen laporan keuangan / surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) beserta lampiran yang belum di audit oleh BPK	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I; c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 23 dan pasal 26; d. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan; b. Berpotensi terjadinya penyalahgunaan bila diaudit oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu badan publik dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; b. Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. 	Terbatas sampai selesai diaudit

		e. Standar AAPII Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit.			
3	Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan dan dokumen pemeriksaan dan reviu hasil pemeriksaan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I; b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 23 dan pasal 26; c. Standar AAPII Bab Standar Komunikasi pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak yg tidak berkepentingan	a. Membantu badan publik dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; b. Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbatas sampai selesai diaudit
4	Arsip dinamis yg menyangkut dokumen SPJ keuangan kegiatan dan perjalanan dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak yg tidak berkepentingan	Mdelindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai selesai diaudit
5	Data keuangan pribadi yang tercantum dalam daftar gaji pegawai.	a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21; dan b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 3; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Dapat mengungkap rahasia keuangan pribadi pegawai; b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan; dan c. Bisa menimbulkan kejahatan / permasalahan hukum pidana saat data informasi pribadi diketahui orang lain.	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan; b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangun; c. Melindungi penyalaligunaan data/ informasi.	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008

					tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2.
6	Biodata pribadi pegawai ASN dan Non ASN (manual dan elektronik)	<p>a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	<p>a. Penyalahgunaan data pribadi pegawai;</p> <p>b. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan;</p> <p>c. Mengganggu privasi dan keselamatan pegawai;</p>	<p>a. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi;</p> <p>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan;</p> <p>c. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.</p>	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2.
7	Identitas ASN dan NonASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p>	Mengungkapkan data pribadi ASN dan NonASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN dan Non ASN	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi

8	Identitas pribadi pemohon informasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4, angka 5, dan huruf j; d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan data pribadi; b. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan; c. Mengganggu privasi pemilik data pribadi; dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi; serta b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan. 	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.
9	Data pribadi yang termasuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penerima program kesejahteraan sosial baik APBN dan APBD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 1,2,3,4 dan 5, Huruf i dan g 	Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon;	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi dari kegaduhan publik; b. Menjaga kerahasiaan data pribadi. 	Relevan dapat dibuka atas persetujuan yg bersangkutan dan untuk kepentingan hukum

		c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi d. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).			
10	Data pribadi penerima bantuan Bedah Rumah	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	a. Mengungkap data pribadi; b. Terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan;	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
11	Data pribadi penghuni Rusunawa Pemkot Makassar	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahn Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Mengungkap data pribadi b. Terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan;	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
12	Data identitas pengadu layanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Menghindari penyalahgunaan oleh	Melindungi kerahasiaan dokumen	Relevan dapat dibuka setelah ada persetujuan

			pihak yg tidak berkepentingan		tertulis dari yang bersangkutan
13	Dokumen kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik ataupun non fisik dokumen individu ASN dan Non ASN)	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan dapat disalahgunakan pihak-pihak tertentu	Melindungi data seseorang sehingga dapat menghindari penyalahgunaan data pribadi	Tidak terbatas kecuali mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN dan Non ASN yang bersangkutan.
14	Dokumen hukum yang termasuk data pribadi pemohon rekomendasi pengangkatan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a angka 1; d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan pihak lain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi; b. Jika diumumkan sebelum adanya putusan, akan terjadi informasi yang salah; c. Berpotensi menguntungkan salah satu pihak; dan d. Kebocoran informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan sehingga berdampak terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga kerahasiaan data pemohon; b. Memperlancar proses pemberian rekomendasi; dan c. Melindung pihak-pihak yang terkait. 	Relevan dapat dibuka setelah proses pengangkatan anak selesai dan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

			kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.		
15	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang memuat detail perhitungan dan Rincian HPS	<p>a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2 dan Pasal 3;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya, Pasal 44 ayat 11 huruf b;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan</p> <p>f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</p> <p>h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun</p>	<p>a. Bertentangan dengan prinsip- prinsip pengadaan dan etika pengadaan;</p> <p>b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa;</p> <p>c. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>d. Menghindari terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat</p>	<p>a. Melaksanakan Pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip prinsip pengadaan dan etika pengadaan;</p> <p>b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa;</p> <p>c. Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran;</p> <p>d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi; dan</p> <p>e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja.</p>	Relevan dibuka jika proses pengadaan barang/jasa selesai.

		2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.			
16	Laporan penanganan kasus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam proses pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 1,2,3,4 dan 5, Huruf i dan g, b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pusat Kendali Kementerian Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon; b. Menghambat kesuksesan penanganan kasus karena ada pengungkapan secara prematur; dan c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang proses penanganan kasus bagi PPKS. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi dari kegaduhan publik; b. Keberhasilan penanganan kasus; dan c. Menjaga kerahasiaan data pribadi. 	Sampai dengan terbitnya laporan akhir penanganan kasus dan yang bersangkutan secara tertulis bersedia dibuka.
17	Konfigurasi database dan aplikasinya serta user name dan password aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi b. Terjadinya penyalahgunaan data pribadi 	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan;	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

					Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2.
18	Dokumen kepemilikan tanah	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Surat Edaran Direktoral Jendereal Pajak No:SE-15/PJ.6/1993 tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Objek Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi pemilik tanah b. Disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan / tidak bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga kerahasiaan data pemilik tanah b. Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu 	Tidak terbatas kecuali atas ijin pemilik/ahli waris yg dibuktikan dengan putusan pengadilan
19	Data surat keterangan ahli waris	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi ahli waris b. Disalah gunakan oleh oknum yang mencari keuntungan / tidak bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga kerahasiaan data ahli waris b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab 	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan tertulis ahli waris
20	Biodata Elektronik Pegawai dan Data pada Sistem Elektronik yang digunakan Pegawai (Database : email, password dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 26 (1) c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	Menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
21	Data pribadi wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 	Data berpotensi disalahgunakan pihak lain	Mernghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yg tidak berkepentingan	Relevan dapat dibuka setelah ada permintaan aparat penegak hukum, atas permintaan sendiri dan alasan

					lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
22	Perlindungan Data Pajak (Database Peta Blok PBB)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Data pajak dapat diakses oleh lembaga/orang yang tidak bertanggung jawab	Melindungi data pajak dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Terbuka setelah proses pemuhtakhiran data selesai
23	Dokumen investigasi internal (audit tertentu)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan data hasil investigasi internal (audit tertentu)	Menjaga kerahasiaan proses hukum / administrasi	Relevan dapat dibuka setelah ada persetujuan tertulis pihak terkait
24	Data Pribadi yang ada dalam dokumen perizinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
25	Data Hasil Pemeriksaan Kelaikan Proteksi Pemadam Kebakaran Pada Gedung Perhotelan & Perkantoran	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik gedung terkait	Melindungi pemilik gedung dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Dapat dibuka setelah dinyatakan layak oleh pihak Damkar
26	Data Pribadi Korban Kebakaran dan Penyelamatan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
27	Data Penyebab Kebakaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17;	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data penyebab kebakaran dari penyalahgunaan	Terbuka setelah ada sertifikasi investigasi

				oleh pihak-pihak tertentu	
28	Data dan informasi korban, pelaku dan pelapor kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan data korban, pelaku dan pelapor b. Mengakibatkan stigma negatif terhadap korban. c. Menimbulkan dampak psikologis/traumatik bagi korban karena datanya tersebar ke publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari terjadinya penyalahgunaan data korban, pelaku dan pelapor; b. Menghindari terjadinya stigma negatif terhadap korban kekerasan; 	Dapat dibuka jika ada persetujuan dari korban, pelaku dan pelapor
29	Notulensi rapat penanganan kasus	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. c. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yg tidak bertanggungjawab	Melindungi kepentingan hukum pihak-pihak yang terkait dgn penanganan kasus.	Terbuka selama ada persetujuan tertulis pihak-pihak terkait dlm penanganan kasus
30	Dokumentasi foto, video, materi paparan dan/atau rekaman suara yang bersifat tertutup, rahasia atau terbatas	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kepentingan hukum pihak-pihak yang terkait dgn penanganan kasus	terbuka selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang terkait dalam penanganan kasus
31	Laporan pengaduan individu atau masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; 	Menghindari penyalahgunaan oleh	Melindungi data pribadi pengadu dan masyarakat	Terbuka selama ada persetujuan tertulis dari

		b. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	pihak yang tidak bertanggungjawab		pengadu individu atau masyarakat
32	Audit pemeriksaan reguler	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data proses pemeriksaan	terbuka setelah audit selesai
33	Laporan Harta dan Kekayaan ASN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data harta dan kekayaan ASN	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis dari ASN
34	Dokumen kasus kepegawaian ASN dan NonASN yang melanggar disiplin, dijatuhi hukuman disiplin, maupun yang dijatuhi hukuman pidana/perdata yang belum berkekuatan hukum maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; c. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	a. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab b. Mengungkap data pribadi ASN dan NonASN yang bersifat rahasia	Melindungi data dokumen kasus kepegawaian ASN dan non ASN	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis dari ASN dan NonASN
35	Dokumen daftar akun, catatan log informasi akses user pada Sistem Informasi	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 17 huruf c, i & j.	Dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan daftar akun, catatan log informasi akses user pada pihak yang tidak memiliki kewenangan.	Terjaganya keamanan data elektronik	Selama berlaku dan masih digunakan

36	Internet Protocol/IP Address Private	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 17 huruf b, i & j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	Selama masih digunakan
37	Source Code Aplikasi	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 35; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17;	Berpotensi terjadinya kerusakan dan pencurian data	Melindungi keamanan sistem pada aplikasi	Selama masih digunakan
38	Sistem keamanan elektronik	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J;	Menyebabkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	1. Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain; 2. Menjaga dan melindungi keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
39	Kode Akses Elektronik	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga dan melindungi keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
40	Sistem Manajemen Database	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J;	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga dan melindungi keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
41	Data Center	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga dan melindungi keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif

42	Data pribadi pelapor dan terlapor Call Center 112	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h.	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi dan menjaga keamanan data pribadi pelapor dan terlapor.	Terbuka sepanjang ada ijin tertulis dari pelapor dan terlapor
43	Data Rekaman CCTV	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h.	Menghindari penyalahgunaan data rekaman CCTV oleh pihak lain	a. Melindungi data pribadi seseorang yang terekam CCTV b. Menjaga keamanan data agar bisa terjaga dengan baik	Terbuka jika mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk keperluan penyelidikan /persidangan
44	Algoritma & Protokol Kriptografi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a & b	Dapat membahayakan infrastruktur digital negara karena sistem & strategi keamanan dapat diketahui pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi keamanan infrastruktur digital	Berlaku selama masih digunakan & masih relevan
45	Laporan detail insiden siber (kredensial) terhadap keamanan informasi	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 - 32 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan b	Informasi sensitif dapat disalahgunakan oleh peretas atau pihak lain untuk merusak sistem atau mencuri data penting	Menjaga dan melindungi informasi sensitif agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Berlaku selama masih digunakan dan masih relevan
46	Informasi data pribadi pengguna data	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a & b b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;	Menghindari penyalahgunaan data pribadi pengguna data	Melindungi data pribadi pengguna data	Terbuka sepanjang ada ijin tertulis dari responden dan pengguna data yang bersangkutan

47	Identitas pengguna Tanda Tangan Elektronik lingkup Pemerintah Kota Makassar	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi</p>	<p>a. Menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi pegawai;</p> <p>b. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan;</p>	<p>a. Melindungi dari penyalahgunaan data pribadi</p> <p>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.</p>	Relevan dapat dibuka jika pihak yang datanya diungkap memberikan persetujuan tertulis.
48	Data pegawai Pemerintah Kota Makassar yang terdiri dari NIP, nama, satuan kerja, golongan, eselon, nama jabatan, status pegawai, jenis kelamin, agama dan pendidikan terakhir	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p>	<p>a. Menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi pegawai;</p> <p>b. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan;</p>	<p>a. Melindungi dari penyalahgunaan data pribadi</p> <p>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.</p>	Relevan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2.
49	Data penduduk Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kota Makassar yang terdiri dari NIK, nama, alamat,	<p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-</p>	<p>a. Menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi penduduk sasaran P3KE;</p>	<p>a. Melindungi dari penyalahgunaan data pribadi</p> <p>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.</p>	Relevan dapat dibuka jika pihak yang datanya diungkap memberikan

	pekerjaan, penghasilan, status kepemilikan rumah, lantai rumah, jamban rumah dan sumber air	Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi Pasal 4	b. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan;		persetujuan tertulis.
50	Data stunting Kota Makassar yang terdiri dari Nama, NIK, jenis kelamin, kecamatan, kelurahan, Puskesmas, alamat, umur, tanggal pengukuran, berat badan, tinggi badan dan status gizi.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi Pasal 4 c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	a. Menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi penduduk; b. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan;	a. Melindungi dari penyalahgunaan data pribadi b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.	Relevan dapat dibuka jika pihak yang datanya diungkap memberikan persetujuan tertulis.
51	Data responden survei yang terdiri dari nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP, umur, pendidikan terakhir dan pekerjaan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi Pasal 4	a. Menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi penduduk; b. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan;	a. Melindungi dari penyalahgunaan data pribadi b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.	Relevan dapat dibuka jika pihak yang datanya diungkap memberikan persetujuan tertulis.
52	Data pelapor aduan masyarakat melalui Lontara plus yang terdiri dari nama, nomor telepon, email, NIK, alamat lengkap, lokasi tag aduan, kelurahan dan kecamatan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi Pasal 4 c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah	a. Memicu terjadinya konflik antara dinas terkait dan pelapor b. Menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi	a. Menghindari terjadinya konflik antara dinas terkait dan pelapor b. Menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Relevan dapat dibuka jika pihak yang datanya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

		diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
53	Data Rekening bank / slip gaji / BPJS Ketenagakerjaan	<p>a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
54	Identitas pelapor/saksi sengketa ketenagakerjaan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan data identitas oleh orang yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi dan untuk kepentingan hukum
55	Dokumen investigasi pelanggaran perusahaan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan data identitas oleh orang yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi dan untuk kepentingan hukum

56	Data peserta pelatihan (identitas & hasil ujian)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
57	Data kasus perselisihan perburuhan (nama pihak, bukti)	a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan stigma negatif b. Menghambat proses penyelesaian sengketa perburuhan	Membantu percepatan proses penyelesaian perselisihan	Sampai kasus selesai
58	Data klaim jaminan sosial tenaga kerja	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
59	Data produktivitas perusahaan spesifik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Dapat disalahgunakan oleh perusahaan kompetitor	Menghindari penyalahgunaan oleh perusahaan kompetitor	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik perusahaan
60	Data pribadi pencari kerja (KTP, ijazah, kontak, CV)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi

61	Perjanjian kerja antara tenaga kerja dan perusahaan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Berpotensi disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dan melemahkan posisi tawar pekerja	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain	Sampai kontrak berakhir
62	Dokumen Audit/Pemeriksaan yang masih dalam proses	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17,	Dapat mempengaruhi independensi auditor, validitas hasil pemeriksaan, dan menimbulkan spekulasi publik.	Menjaga obyektivitas pemeriksaan dan menghindari opini prematur publik.	Sampai laporan final ditetapkan.
63	Data identitas pelapor (whistleblower) / saksi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Dapat membahayakan keselamatan pelapor/saksi serta mengurangi efektivitas mekanisme pengaduan.	Melindungi keselamatan pelapor/saksi dan memperlancar efektivitas mekanisme pengaduan.	Permanen
64	Informasi terkait proses penyelidikan/pemeriksaan internal yang belum selesai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Berisiko menghilangkan bukti, memengaruhi pihak yang diperiksa, mengganggu proses penyelidikan.	Menjaga efektivitas dan integritas proses pemeriksaan internal.	Sampai proses selesai
65	Dokumen terkait proses hukum/penegakan hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2	Dapat mengganggu penyidikan, peradilan, dan dapat menimbulkan intervensi publik.	Membantu kelancaran penegakan hukum.	Sampai perkara berkekuatan hukum tetap
66	Data temuan audit yang terkait rahasia dagang/pihak ketiga	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat merugikan pemilik usaha, menyebabkan	Menjaga keadilan bisnis dan melindungi rahasia	Permanen

		b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 Huruf b angka 2 dan 3	persaingan usaha tidak sehat dan bisa membuka rahasia perusahaan.	perusahaan yang diaudit.	
67	Konsep atau draft dokumen kebijakan yang masih dalam pembahasan internal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf i	Dapat menimbulkan kesalahpahaman publik.	Menunggu finalisasi agar publik hanya menerima informasi yang sah.	Berlaku sampai dokumen disahkan/final
68	Data pribadi ASN/Pejabat (riwayat kesehatan, NPWP, rekening bank)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat melanggar hak privasi ASN/pejabat bersangkutan.	Menjaga privasi individu dan mencegah potensi penyalahgunaan data pribadi.	Relevan dapat dibuka jika ada persetujuan yg bersangkutan
69	Dokumen dan pengusulan Mutasi Pegawai dalam jabatan Struktural / Fungsional	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan pada saat penyusunan/pengusulan	Menjaga kondusifitas di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan/mutasi
70	Data gaji dan tunjangan pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi (Kondisi keuangan, aset & pendapatan)	Melindungi informasi data pribadi pegawai	Terbuka selama ada persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan
71	Biodata pelapor layanan pengaduan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Menghindari penyalahgunaan data pribadi pelapor	Menjaga dan melindungi data pribadi pelapor	Terbuka sepanjang ada ijin tertulis dari yang bersangkutan
72	Data pribadi pemohon penelitian	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;	Menghindari penyalahgunaan data pribadi pemohon penelitian	Menjaga dan melindungi data pribadi pemohon penelitian	Terbuka sepanjang ada ijin tertulis dari yang bersangkutan

		b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			
73	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang berupa sertifikat kepemilikan tanah	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.	Menghindari terjadi penyalahgunaan Sertifikat Kepemilikan Tanah	Melindungi BMD dalam bentuk Sertifikat Tanah dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbuka sepanjang ada ijin dari pihak berwenang
74	Data spesifikasi teknis kendaraan bermotor yg akan dan telah dilakukan pengujian	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	a. Berimplikasi pada persaingan bisnis yg tidak sehat b. Menyebabkan pengguna jasa angkutan darat dan laut tidak menggunakan jasa angkutan yang dipublikasikan	a. Menghindari persaingan bisnis yang tidak sehat b. Menghindari ketakutan pengguna jasa angkutan kendaraan bermotor	Setelah diterbitkannya buku uji berkala kendaraan
75	Daftar laporan hasil uji kendaraan	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	a. Berimplikasi pada persaingan bisnis yg tidak sehat b. Menyebabkan pengguna jasa angkutan darat dan laut tidak menggunakan jasa angkutan yg dipublikasikan	a. Menghindari persaingan bisnis yang tidak sehat b. Menghindari ketakutan pengguna jasa angkutan kendaraan bermotor	Setelah pengujian selesai
76	Data pribadi penderita HIV/AIDS	a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan j;	Dapat mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia, menjaga stigma dan diskriminasi serta	Dapat dibuka apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan

		<p>c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 297 ayat (3) Pasal 351 ayat (1)</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 21 ayat (3)</p>	berkepentingan dan berpotensi terjadinya stigma dan diskriminasi	kerawanan di masyarakat	untuk kepentingan khusus
77	Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan [jamaah haji]	<p>a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nmor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji</p>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Dapat dibuka aabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan untuk kepentingan khusus
78	Data dan isi rekam medis pasien	<p>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32 huruf I;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p>	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang dan data berpotensi dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	Melindungi rahasia pribadi yang terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan peraturan perundang-undangan

79	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Untuk Kepentingan Penegakan Hukum / Visum ed Repertum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j; b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang hak pasien c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum 	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data pasien Visum Ed Repertum b. Mempermudah penegakan hukum 	Dapat dibuka untuk kepentingan hukum
80	Laporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j; c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32 huruf (i); d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. 	Mengungkap data pasien narkotika yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien narkotika	Dapat dibuka untuk kepentingan hukum
81	Foto/ video pasien tampak muka	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j; c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32 huruf i; d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan 	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-Undang	Sampai dibuka oleh pihak- pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan peraturan perundang-undangan
82	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 	Berpotensi disalahgunakan orang tidak bertanggungjawab	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan	Sampai hasil audit lembaga yang berwenang selesai

		b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17		oleh pihak yang tidak berwenang	
83	Dokumen Keuangan SPJ, SP2D, SPM, SPP	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Dapat digunakan oleh pihak yg tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat dibuka setelah diaudit
84	Data Pribadi Pelaku Usaha	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang bersifat rahasia	Dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
85	Dokumen identitas pemilik tanah (KK, KTP, NPWP dll serta salinan sertipikat yang memuat data pribadi)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Penyalahgunaan data pribadi, risiko penipuan atau pemalsuan identitas	Melindungi data pribadi warga negara, serta mencegah penyalahgunaan data pribadi dari resiko penipuan dan pemalsuan	Dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum.
86	Dokumen yang dilampirkan masyarakat dalam pelayanan pertanahan (KK, KTP, NPWP, sertipikat tanah, akta jual beli, surat pernyataan pribadi dan dokumen sejenisnya).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Dapat mengungkapkan data pribadi pemohon dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan (Penipuan, pemalsuan, pencurian identitas dan spekulasi kepemilikan tanah)	Melindungi data pribadi warga negara. Mencegah penyalahgunaan data pribadi dan resiko penipuan dan pemalsuan	Dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum.

87	Dokumen pertanahan (sertipikat, SK Hak, peta bidang, dokumen penguasaan.pemilikan, data perolehan tanah dll)	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 	Mengungkap data pribadi pemilik, memicu potensi penipuan, spekulasi dan konflik kepemilikan	Menjaga kepastian hukum dan perlindungan data pemilik tanah	Dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum.
88	Dokumen tanah ex-Gemeente, eigendom verponding (peta, risalah, dokumen pengalihan dan arsip pertanahan terkait) Tanah milik Pemerintah Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 	Menimbulkan klaim sepihak, spekulasi, konflik kepemilikan dan penyalahgunaan arsip	Melindungi kepastian hukum aset daerah serta ,menjaga ketertiban administrasi pertanahan	Dapat dibuka atas kepentingan hukum.
89	Detail tanah untuk fasilitas vital (kantor pemerintah, TNI/Polri, jaringan listrik/air/ telekomunikasi)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Berpotensi disalahgunakan untuk tindakan yang mengancam keamanan	Keamanan dan kerahasiaan fasilitas vital terjamin	Selama tanah digunakan sebagai obyek strategis / fasilitas vital
90	Hasil appraisal nilai tanah sebelum diumumkan resmi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan tanah 	Menimbulkan spekulasi harga, manipulasi informasi dan konflik sosial	Proses musyawarah berjalan lebih kondusif dalam menentukan taksasi	Sampai hasil appraisal diumumkan resmi
91	Dokumen kontrak/kerja sama yang memuat klausul kerahasiaan atau data rekening pihak ketiga	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g	Menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Menghindari penyalahgunaan data pribadi	Dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan dan

					untuk kepentingan hukum.
92	Buku F (Daftar Ketetapan Himpunan Pajak) dan Buku C (peta blok / ex tanah adat)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yg tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan peralihan hak	Dapat dibuka untuk kepentingan hukum
93	Dokumen Surat Keterangan Ahli Waris	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terjadinya penyalahgunaan yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan dokumen	Dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum.
94	Data pribadi korban bencana	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terjadinya penyalahgunaan data pribadi	Menghindari penyalahgunaan data pribadi	Dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum.
95	Data hasil evaluasi kinerja direksi dan dewan pengawas BUMD Kota Makassar	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>d, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi hasil evaluasi	Dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum.

		Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD			
96	Data detail hasil penilaian seleksi terbuka calon anggota dewan pengawas/ anggota komisaris dan anggota direksi BUMD Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD 	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi hasil evaluasi	Dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum.
97	Akta Jual Beli dan Akta hibah	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah; d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah terjadinya penyalahgunaan	Dapat dibuka atas permintaan dan persetujuan tertulis para ahli waris dan untuk kepentingan hukum.
98	Sporadik (Riwayat tanah)	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan tanah 	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah terjadinya penyalahgunaan	Dapat dibuka atas permintaan dan persetujuan tertulis yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum.

99	Data Pribadi spesifik pelaku UMKM dan pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 s/d Pasal 38; c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 3c	Dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi pelaku UMKM	Menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi pelaku UMKM	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik data pribadi
100	Data Keuangan Perkembangan Usaha/ Pendapatan UMKM	a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4, Pasal 35 s/d Pasal 38; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 3c	Dapat menimbulkan penyalahgunaan bagi pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan bagi pihak tidak bertanggung jawab	Terbuka sepanjang ada persetujuan tertulis pemilik usaha

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd

A. ZULKIFLY